

# MATERI DASAR PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN

## MODUL 1 – Konsep Ekonomi dan Terminologi Dasar dalam Peraturan Perdagangan Global

---

### 1. Mengapa Perdagangan antar Negara Terjadi ?

Menurut teori ekonomi klasik, perdagangan dan pertumbuhan bisa berjalan secara seiring satu sama lain. Sama dengan manusia yang harus bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya, sebuah negara tergantung pada negara lain untuk barang dan jasa yang dibutuhkannya. Pada dasarnya teori tersebut yang menjadi panduan bagi konsep perdagangan bebas.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep perdagangan barang dan jasa lintas negara tanpa hambatan. Pedagangan bebas menurut sebagian besar ahli ekonomi adalah model perdagangan yang lebih baik karena harga barang akan lebih murah dan kehidupan masyarakat secara umum akan terangkat jika hambatan perdagangan dihapuskan.

Hal tersebut berlaku untuk semua negara bahkan bagi negara negara kaya seperti Amerika Serikat atau Jepang atau negara negara di Eropa Barat. Perdagangan terjadi karena kenyataan bahwa tidak semua negara dapat menghasilkan sendiri barang dan jasa untuk dirinya sendiri, dan akan lebih baik jika mengimpor barang dan jasa dari negara lain yang lebih murah karena diproduksi lebih efisien. Sebaliknya negara akan memiliki nilai tambah jika mengekspor barang dan jasa yang bisa merekaproduksi secara efisien.

Amerika Serikat misalnya, adalah negara yang paling maju dalam teknologi dan memiliki mesin terbaru untuk memproduksi mesin mesin lainnya. Namun mereka tidak memiliki komponen mesin tertentu yang diproduksi oleh Indonesia, atau terlalu mahal kalau harus memproduksi komponen tersebut di Amerika Serikat.

Inilah pada dasarnya teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif hanya bisa terjadi jika suatu negara mampu memproduksi baran dan jasa lebih efisien daripada orang lain. Suatu negara cenderung untuk mengeskor barang barang yang mereka produksi secara efisien dan mengimpor untuk barang yang mereka tidak bisa produksi secara efisien.

### 2. Bagaimana konsumen dan produsen mendapatkan keuntungan dari perdagangan?

Jika negara A memproduksi beras pada tingkat harga \$ 1.000 per ton, sementara negara B memproduksi beras pada tingkat harga \$ 2.000 per ton maka bisa diartikan negara A memiliki keunggulan komparatif dibanding negara B, sebagai produsen beras. Negara A memiliki harga beras yang lebih rendah dibanding negara B, oleh karena itu jika mereka menjual beras ke negara B maka konsumen di negara B akan diuntungkan. Dengan demikian maka akan terjadi permintaan yang tinggi dari konsumen negara B terhadap beras dari negara A. Oleh karena peningkatan permintaan maka akan banyak

lapangan kerja untuk produksi beras di negara A. Bank bank di negara A akan banyak mengeluarkan pembiayaan untuk ekspor, akan lebih banyak kapal kapal yang digunakan untuk pengiriman beras ke negara B dan akan lebih banyak transportasi digunakan untuk mengangkut beras di negara B untuk distribusi kepada konsumen.

### **3. Apakah ada kelemahan dan kerugian dari perdagangan ?**

Produsen lokal mungkin akan dirugikan dari kebijakan perdagangan yang lebih terbuka. Ada banyak kasus dimana pemerintah membuka impor secara tidak terkontrol sehingga barang impor bersaing bebas dengan produk lokal. Negara membiarkan produk impor masuk secara bebas dalam ekonomi lokal, dan mengurangi tarif atau pajak impor pada produk tersebut, yang akhirnya menurunkan biaya impor akan produk tersebut.

Sebagai contoh, negara B sebagai produsen beras mengalami kerugian karena impor beras yang sangat besar dari negara A atau negara lain. Konsumen di negara B sepertinya akan mendapat untung karena mendapatkan beras yang murah dari pada harus membeli beras lokal yang lebih mahal. Jika hal ini terjadi maka petani di negara B akan kehilangan mata pencaharian karena pertanian padi menjadi tidak menguntungkan. Kasus ini secara jelas menggambarkan bagaimana produses lokal menderita karena tekanan kompetisi dengan beras impor.

### **4. Apakah semua negara sepakat untuk perdagangan bebas?**

Setiap negara memiliki posisi yang berbeda terkait dengan perdagangan bebas tergantung pada seberapa jauh dampak liberalisasi perdagangan terhadap ekonomi mereka. Jika kebijakan perdagangan memberikan manfaat terhadap ekonomi lokal dan pendapatan rakyat, maka ada peluang besar bagi negara tersebut untuk lebih mengembangkan perdagangan yang lebih terbuka. Namun sebaliknya, jika liberalisasi perdagangan berdampak buruk terhadap ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat maka negara tersebut cenderung menolak membuka pasar mereka.

### **5. Apakah instrumen kebijakan perdagangan yang dihapuskan dengan penerapan perdagangan bebas ?**

Kuota perdagangan atau terkenal dengan pembatasan kuantitatif atau *quantitative restriction* (QR). QR adalah bentuk dari pembatasan non tarif atau *non tariff barrier*. Ada batas secara kuantitas dari barang yang bisa diimpor masuk ke dalam negeri. Jika menggunakan contoh diatas, maka negara B ingin memproteksi petani mereka dari kehilangan mata pencaharian akibat kompetisi dengan beras impor dari negara B. Pemerintah negara B dapat menentukan kuota untuk membatasi jumlah impor dari negara A. Pembatasan kuota tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap sektor perberasan di negara B dari kompetisi impor beras dari negara A. Dalam WTO, pembatasan kuota diganti menjadi penerapan tarif sehingga fungsi proteksi menjadi lebih berkurang.

Sementara itu, tarif merupakan pajak dari barang impor. Dengan demikian seperti pajak yang dikenakan pada konsumen sebagian atau seluruhnya, tarif cenderung meningkatkan harga produk impor. Tarif adalah instrumen yang terus diturunkan untuk mencapai perdagangan yang bebas.

## 7. Bagaimana negosiasi perdagangan antar negara ?

Saat ini, perundingan perdagangan antar negara berlangsung secara bilateral, regional dan multilateral. Negosiasi perdagangan bilateral adalah proses negosiasi perjanjian perdagangan antara dua negara. Misalnya, untuk mencapai akses pasar yang lebih besar antara Indonesia dan Jepang, maka kedua negara mendorong perundingan perdagangan bilateral yang sekarang dikenal sebagai *Japan Indonesia Economic Partnership Agreement* (JIEPA).

Perjanjian perdagangan regional adalah kesepakatan perdagangan antara negara-negara dalam suatu kelompok negara berdasarkan komunitas negara tertentu berdasarkan geografi, bahasa, sejarah dan sebagainya. Perjanjian tersebut akan mendorong peningkatan perdagangan dan pertumbuhan diantara negara-negara anggotanya. Contoh perjanjian perdagangan bilateral adalah *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN).

WTO adalah contoh dari sistem perdagangan multilateral. Bisa dikatakan bahwa sistem perdagangan multilateral lebih baik karena aturan lebih transparan, setara dan diikuti oleh semua negara-negara anggota. Negosiasi perdagangan bilateral mungkin akan lebih menguntungkan negara yang lebih kuat secara ekonomi dibandingkan dengan mitra dagangnya yang lebih lemah.

## 8. Bagaimana terbentuknya GATT-WTO ?

Sebelum adanya WTO, perdagangan diatur dengan General Agreement on Tariff and Trade (GATT). GATT dibentuk pada tahun 1947 di Bretton Woods, yang kelahirannya bersamaan dengan kelahiran Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). GATT dibentuk untuk mendorong penurunan secara progresif hambatan perdagangan melalui negosiasi yang berlangsung reguler atau yang sering disebut sebagai putaran perundingan yang dilakukan antara tahun 1948 sampai 1995. Putaran perundingan tersebut yang kemudian mempertajam negosiasi dan menghasilkan kesepakatan penting yang mendorong terbentuknya WTO.

WTO merupakan badan multilateral yang mengatur sistem perdagangan dunia sampai saat ini. WTO terbentuk pada putaran ke delapan dalam perundingan perdagangan dunia yang berlangsung di Punta del Este, Uruguay, yang terkenal dengan Putaran Uruguay. Dengan terbentuknya WTO, maka GATT digantikan dengan WTO.

Pada putaran Uruguay, perundingan mencakup kesepakatan akan daftar perjanjian perdagangan yang luas, terdiri dari 17 hal diantaranya adalah :

Perjanjian Perdagangan Barang :

- Pertanian (*Agriculture*)
- Sanitasi Perdagangan (*Sanitary and Phytosanitary Measures*)
- Tekstil dan Pakaian (*Textile and clothing*)
- Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier to Trade*)
- Investasi terkait Perdagangan (*Trade related Investment Measures /TRIMS*)
- Anti Dumping
- Inspeksi sebelum Pengapalan (*Pre-shipment Inspection*)
- *Rules of Origin*
- Lisensi Impor (*Import Licensing*)

- *Subsidies and Countervailing Measures*
- *Safeguards*

Perjanjian perdagangan secara terpisah

- *General Agreement on Trade in Services*
- *Trade related aspects of Intellectual Property Rights*
- *Prulilateral Trade Agreements on trade in Civil Aircraft, Agreement on Government Procurement, International Dairy Agreement, International Bovine Agreement Mechanism*
- *Dispute Settlement Understanding*
- *Trade Policy Review Mechanism*

## 9. Apakah prinsip dasar keanggotaan keanggotaan dalam WTO?

Prinsip dasar yang berlaku bagi seluruh anggota WTO adalah prinsip ***Most Favored Nation*** (MFN), yakni semua negara anggota tanpa terkecuali harus menggunakan aturan perdagangan yang sama tanpa diskriminatif. Hal ini berarti misalnya kebijakan perdagangan yang diperlakukan Indonesia untuk Amerika Serikat, juga berlaku yang sama dengan perlakuan terhadap negara lain. Indonesia tidak bisa mengistimewakan salah satu negara mitra dagangnya, kecuali jika negara tersebut bukan anggota WTO. Prinsip MFN dapat dikatakan sebagai penerapan standar dari kebijakan perdagangan global.

Prinsip lain adalah ***national treatment*** dimana menekankan bahwa kebijakan domestik perdagangan suatu negara tidak boleh bertentangan dengan kebijakan perdagangan dengan negara lain. Misalnya, jika Indonesia melarang masuknya suatu produk impor karena mengandung kandungan cemaran tertentu seperti aflatoxin, maka kebijakan domestik dalam negeri Indonesia harus juga melarang produk petani dalam negeri yang mengandung cemaran yang sama.

Prinsip selanjutnya adalah ***single undertaking***, yang berarti negara tidak dapat memilih untuk mengabaikan salah satu perjanjian walaupun negara tersebut tidak melihat manfaat dari perjanjian tersebut. Dengan prinsip ini, negara anggota WTO harus komitmen pada semua perjanjian yang telah disepakati dalam WTO.

WTO menyadari kenyataan bahwa pemerintah memiliki perbedaan dalam tingkat pembangunan dan ketersediaan sumberdayanya. Oleh karena itu WTO juga memasukkan klausul ***perlakuan khusus dan berbeda (Special and Differential Treatment)***. Ini berarti negara kaya akan membayar lebih banyak, atau mendapatkan pemotongan lebih besar atau mempunyai waktu penerapan lebih pendek dalam hal pengurangan tarif. Sementara itu negara miskin, rentan dan negara berkembang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pemotongan lebih rendah dan implementasi lebih lama dalam pengurangan tarif perdagangan.

## Modul 2 : Isu tentang Agreement on Agriculture (AOA) dalam WTO

---

### 1. Apakah dasar ketentuan AOA dalam WTO?

Perjanjian WTO tentang Pertanian memiliki 3 pilar utama yaitu akses pasar, dukungan domestik, dan kompetisi ekspor. Masalah utama untuk setiap pilar yang dibahas adalah sebagai berikut:

#### **Akses Pasar**

##### **Mengganti QRS dengan Tarif atau "Tariffication"**

Oleh karena tujuan utama WTO adalah untuk mempromosikan perdagangan bebas, maka WTO akan mendorong penghapusan pembatasan kuantitatif untuk diganti menjadi berdasarkan tarif. Tarif yang diyakini akan lebih baik dari kuota karena akan lebih terukur dan terprediksi sebagai instrumen perdagangan. Penghapusan pembatasan kuantitatif akan memungkinkan masuknya produk impor pada pasar domestik sepanjang eksportir mampu membayar tarif impor produk tersebut. Dalam hal ini, tarif menjadi instrumen perlindungan terakhir dari negara pengimpor dari tekanan produk produk impor.

##### **Penurunan tarif**

Setelah mengganti kuota atau pembatasan kuantitatif dengan tarif, negara-negara anggota WTO juga berkomitmen untuk mengurangi tarif dari waktu ke waktu. Negara-negara berkembang, dijadwalkan akan memangkas tarif mereka turun dari 10 hingga 24 persen dalam jangka waktu 10 tahun, sementara negara-negara maju diharapkan untuk mengurangi tarif mereka oleh 15 hingga 36 persen dalam jangka waktu 6 tahun.

Setiap negara wajib menentukan jadwal komitmen penurunan tarif untuk produk pertanian. Dalam jadwal ini, ada tingkat tarif awal yang menjadi acuan atau disebut *bound rate*, mengacu pada tarif pada awal dan akhir tahun pelaksanaan AOA. Sementara itu ada yang disebut sebagai *applied tariff rate*, atau tarif yang sebenarnya diterapkan oleh pemerintah. **Applied tariff** biasanya dibawah dari **bound rate** (Box 1)

#### **Box 1**

Di Filipina, misalnya, pemerintah telah meliberalisasi sektor pertanian bahkan sebelum dari jadwal pengurangan tarif yang ditetapkan WTO. Hal ini disebabkan karena pada walnya Filipina akan mendapatkan banyak keuntungan dari liberalisasi perdagangan. Misalnya, *bound rate* untuk produk sayuran di Filipina adalah 40 persen, sementara *applied tariff* adalah 7 %. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki program serupa subsidi bagi para petani yang disebut US Farm Bill.

##### **Tarif Rate Quota (TRQs) dan Minimum Access Volume (MAV)**

TRQ adalah volume dari produk dimana suatu negara dapat mengimpor pada tingkat tarif yang lebih rendah atau disebut *in-quota rates*. Semua impor lainnya akan terkena tarif normal atau disebut **out-of-quota rates**, yang pada umumnya lebih tinggi dibanding **in-quota rates**.

Mekanisme ini juga disebut **Minimum Access Volume (MAV)**. Penentuan awal dari volume produk yang dapat diimpor dalam mekanisme MAV setara dengan 3 persen dari konsumsi nasional akan produk tersebut dari tahun 1986-1988.

### **Special Safeguards**

Perjanjian tentang Pertanian juga memiliki **Special Safeguards Mechanism (SSM)** yang memungkinkan negara-negara untuk memberikan perlindungan sementara bagi produsen lokal akibat banjir produk impor. Negara-negara yang diperbolehkan untuk menaikkan tarif sementara dalam hal tingkat impor yang besar dari indikasi volume dan harga. Beberapa klausul tambahan yang dapat ditambahkan juga diatur dalam formula WTO. Negara-negara maju, di sisi lain, ada juga memiliki perangkat perlindungan melalui klausul SSG.

### **Pengurangan dukungan Domestik**

Dukungan domestik mengacu pada total subsidi yang diberikan oleh pemerintah pada produsen pertanian. Ini dibagi ke dalam kotak yang berbeda untuk mengklasifikasikan berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah.

#### **Box 2**

Contoh yang baik adalah mekanisme dukungan harga mendukung di Eropa dalam kerangka *Common Agricultural Policy (CAP)*. Uni Eropa membeli produk pertanian dari produsen pada saat harga produk tersebut jatuh di bawah tingkat harga yang tersubsidi. Dukungan harga tersebut ditentukan sangat terlalu tinggi sehingga produsen memproduksi lebih dari apa yang ingin konsumen beli. Uni Eropa telah berjanji untuk membeli surplus produksi melalui mekanisme dukungan harga.

### **Amber Box**

Kotak Amber yang merujuk kepada semua subsidi pada produksi pertanian yang mengakibatkan distorsi perdagangan. yang mendukung distorts berdampak pada perdagangan atau pertanian. Ini juga disebut *Aggregate Measure Support (AMS)*. Contohnya adalah subsidi harga. Kasus dukungan yang lain yang termasuk dalam kategori ini adalah insentif produksi bagi petani karena mampu memproduksi lebih banyak. Negara-negara diharapkan untuk mengurangi subsidi yang dikategorikan sebagai amber box yang telah disetujui dalam AoA.

### **Blue Box**

Blue box mengacu pada program pembatasan produksi pertanian suatu negara. Program ini dimaksudkan untuk untuk membatasi produksi dari produk tertentu. Beberapa negara memiliki keinginan untuk membayar para produsen tidak menanam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga produk tersebut tidak jatuh karena over produksi. Bentuk subsidi ini juga akan dikurangi dalam kerangka AOA

### **Green Box**

Green Box merupakan bentuk subsidi yang tidak langsung berpengaruh pada produksi dan perdagangan. Hal ini biasanya merupakan semua program program pembangunan pertanian. Bentuk subsidi ini diklasifikasikan sebagai subsidi yang tidak mengganggu perdagangan, oleh karenanya diijinkan dalam kerangka AOA. Misalnya, pemerintah dapat memberikan dukungan produksi pertanian dalam bentuk seperti :

- Penelitian

- Pengendalian hama dan penyakit
- Infrastruktur
- Ketahanan pangan

Hal lain yang boleh dilakukan adalah memberikan pembayaran yang tidak menstimulasi produksi seperti asistensi untuk petani dalam restrukturisasi pertanian dan pembayaran langsung dalam kerangka program lingkungan dan program untuk asistensi tingkat regional.

**Box 3.**

Impor gula oleh Uni Eropa dalam kerangka *Common Agriculture Policies (CAP)*. Petani dan industri gula dibayar empat kali dari harga gula di pasar dunia, sehingga menghasilkan 4 juta ton surplus. Kelebihan yang kemudian dilempar ke pasar dunia dengan bantuan lebih dari 1 miliar subsidi ekspor yang dibayarkan kepada sekelompok kecil industri gula.

**De Minimis**

De minimis adalah dukungan yang diberikan oleh negara untuk para produsen berdasarkan total nilai produksi pertanian domestik. Ada dua jenis de minimis dukungan-produk spesifik dan non-produk spesifik. Untuk non-produk spesifik, negara-negara berkembang diizinkan untuk memberikan subsidi dari sekitar 10 persen dari nilai total produksi pertanian. Di sisi lain, negara maju diizinkan memberikan subsidi 5 persen dari total nilai produksi pertanian.

Hanya untuk menjelaskan, jika negara A nilai produksi pertanian adalah Rp. 10 miliar rupiah maka negara A diperbolehkan untuk mensubsidi petani sebesar Rp. 1 milyar sejauh negara tersebut merupakan negara berkembang. Produk spesifik de minimis adalah dukungan untuk produk tertentu berdasarkan kontribusi terhadap total nilai produksi pertanian. Sebagai contoh, negara A total nilai produksi jagung Rp 5 miliar, maka negara yang dapat memberikan sekitar Rp. 500 juta untuk mendukung petani jagung.

**Penghapusan Kompetisi Ekspor**

Kompetisi ekspor berasal dari subsidi ekspor yang diberikan kepada negara maju produsen dari produk ekspor. Hal tersebut merupakan kompensasi langsung atau tidak langsung oleh pemerintah untuk perusahaan swasta untuk meningkatkan ekspor produk pertanian. Subsidi ekspor adalah pembiayaan untuk ekspor, promosi ekspor, keringanan pajak dan bentuk bantuan lainnya yang dapat mengakibatkan biaya lebih rendah daripada biaya normal untuk produk ekspor.

CAIRNS Group, misalnya, adalah untuk meminta penghapusan dan larangan subsidi ekspor pertanian. Kelompok ini berpendapat bahwa subsidi ekspor menurunkan harga pasar internasional dari produk pertanian dan akan berkaibat pada penurunan pendapatan petani dan kontribusi pada kemiskinan di pedesaan. Selain itu, penurunan harga akan berbahaya bagi produksi pangan domestik dari negara pengimpor dan mengurangi insentif bagi produsen. Penghapusan subsidi ekspor diharapkan akan dapat meningkatkan harga produk pertanian di pasaran internasional.

### **Bantuan Pangan (Food Aid)**

Seperti namanya, bantuan pangan umumnya diberikan negara kaya untuk membantu negara miskin dan berkembang. Seolah olah hal ini seperti filantropi namun namun pada kenyataannya, bantuan pangan telah dikritik karena mengakibatkan tekanan bagi kehidupan bagi petani di negara penerima bantuan. Hal ini terutama dikritik sebagai karena merupakan bentuk kompetisi yang tidak adil terhadap pertanian lokal, dan sebuah mekanisme untuk negara-negara maju melakukan dumping produk dalam rangka membuang surplus produksi ke negara lain.

Ada dua jenis bantuan pangan. Pertama adalah dalam bentuk gratis dan tanpa prasyarat khusus, sementara kedua adalah dalam bentuk pinjaman lunak dengan syarat-syarat yang tidak ketat. Contohnya adalah bentuk bantuan pangan berdasarkan **Public Law 480** dari Amerika Serikat. Filipina mengakses program ini dengan melakukan impor jagung, padi atau kedelai dari Amerika Serikat dan akan dibayar dalam jangka waktu 20 tahun.

Pemerintah Filipina menjual produk impor ini di pasar domestik dan menggunakan hasil penjualan untuk membiayai proyek-proyek lokal. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Filipina untuk mengakses PL 480 meskipun produksi dalam negeri telah mencukupi. Selain akan merugikan produsen lokal, bantuan pangan sangat kontroversial karena penggunaan dana sesungguhnya berasal dari penjualan bantuan pangan tersebut. Isu bantuan pangan merupakan isu yang sangat penting bagi negara-negara miskin dan berkembang, tetapi sayangnya, WTO masih mengatur secara ketat penggunaannya.

### **2. Apakah semua produk yang akan liberalisasi ? Tidak adakah pengecualian yang diberikan?**

WTO telah menyetujui untuk memberikan pengecualiaan untuk beberapa negara untuk menerapkan pembatasan kuantitatif (QR) yang tercantum pada lampiran 5 dari AOA untuk alasan yang kuat. Filipina, misalnya, telah dapat mempertahankan QR untuk beras untuk tujuan ketahanan pangan. Seharusnya batas waktu penerapannya adalah 2005, namun Filipina berhasil melakukan renegotiasi sampai 2012.

### **3. Bagaimana organisasi masyarakat sipil mengembangkan isu-isu WTO?**

Banyak permasalahan yang terjadi seputar kesepakatan WTO, bahkan ketika masih dalam GATT. Banyak petani menyadari bahwa ketentuan dalam AOA akan membawa atan Pertanian akan membawa malapetaka pertanian khususnya untuk petani kecil di nagara miskin. Mereka melihat bahwa tidak ada jalan untuk produk mereka mampu berkompetisi dengan produk impor yang disubsidi besar besaran dari negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Klausul **Special and Differential Treatment** untuk negara miskin dan berkembang telah ada, namun jika melihat keseluruhan aturan dalam AOA nampak bahwa aturan tersebut masih menguntungkan bagi negara negara maju.

#### **4. Apakah isu-isu tertentu diangkat oleh organisasi masyarakat sipil?**

##### **Liberalisasi pasar yang semakin meluas di sektor pertanian**

Sebagaimana dibahas di atas, hal yang paling diutamakan dari GATT dan WTO adalah untuk menggantikan pembatasan kuantitatif atau kuota menjadi tarif untuk kemudian tarif tersebut diturunkan, dalam rangka mempromosikan perdagangan lebih terbuka antara dan di antara negara-negara. Negara seperti Indonesia telah membuka pasarnya secara terbuka, walaupun petani terutama petani skala kecil yang belum siap untuk bersaing. Negara seperti Filipina telah menghapuskan pembatasan kuantitatif dan memilih untuk mengenakan tarif sekitar 93 produk khususnya, sayuran, daging, jagung dan lain-lain.

Petani di negara berkembang telah menyatakan keprihatinannya karena mereka akan kalah bersaing dengan produk impor karena mereka menerima subsidi sangat minim dibanding petani di negara maju. Sementara itu negara maju masih mempertahankan subsidi, negara berkembang ditekan untuk membuka pasarnya dengan menurunkan tarif.

Sayangnya, walaupun negara-negara kaya telah menurunkan tarif sesuai dengan komitmen kemungkinan besar tidak akan menderita dari dampak penurunan tarif tersebut. Tarif awal mereka sangat tinggi sehingga penurunan setengahnya tidak akan berdampak signifikan terhadap pertanian negara mereka. Kasus Jepang, Swiss dan banyak negara maju lainnya tarif sekitar 400 persen.

##### **Resistensi negara maju untuk mempertahankan subsidi ekspor**

Perlakuan tidak adil dalam WTO sangat nyata jika melihat ketentuan AOA pada subsidi ekspor. AOA masih memungkinkan negara-negara maju untuk mempertahankan tingkat subsidi ekspor sangat tinggi, karena memungkinkan mereka untuk memberikan subsidi ekspor sekitar 64 persen dari subsidi mereka selama 1986-1990.

Memang benar negara-negara berkembang diizinkan untuk menggunakan 76 persen dari mereka ekspor subsidi 1986-1990 sebagai bagian dari perlakuan khusus dan berbeda-beda. Namun, ini ketentuan pada dasarnya adalah tidak adil bagi negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan dana untuk memberikan subsidi ekspor bagi petani mereka.

Uni Eropa memberikan subsidi ekspor tertinggi. Dari 1995-2000, hampir 92 persen atau US \$ 29,3 miliar dari total nilai subsidi ekspor di dunia. Berikutnya adalah Swiss dan Norwegia yang memberi US \$ 1,8 miliar sementara subsidi ekspor di AS memberi US \$ 487 juta. Sementara itu 23 negara memberikan subsidi total ekspor sebesar US \$ 1,5 miliar pada tahun yang sama. 23 negara ini terdiri dari negara berkembang seperti Pakistan, India, Korea dan Thailand.

##### **Kurangnya pengetatan disiplin pada kredit ekspor dan bantuan pangan**

Selain memberikan subsidi ekspor, negara-negara maju secara sah menggunakan bantuan pangan untuk memasuki pasar negara-negara berkembang. Contohnya adalah US 'PL 480. Dari 1991 sampai 2001, total nilai impor Filipina dapat diakses dari PL 480 adalah sekitar US \$ 190 juta dari produk jagung, beras dan kedelai.

### **Peluang pembayaran langsung ke produsen di bawah Green Box**

Sebagaimana dibahas sebelumnya, dalam Green Box masih dimungkinkan pemberian subsidi di bawah WTO karena diyakini tidak langsung berpengaruh pada perdagangan dan produksi. Namun dalam kenyataannya banyak negara maju memberikan subsidi untuk pembayaran langsung, diklasifikasikan dalam Green Box. Negara-negara berkembang yang menentang ini modus pembayaran langsung ini.

### **Penyalahgunaan *Sanitary and Phytosanitary Measures* untuk mencegah masuknya barang ke pasar di negara-negara maju**

Satu hal yang baik yang GATT / WTO adalah membuka peluang akses pasar lebih luas untuk produk negara berkembang ke negara maju. Hal ini seharusnya menjadi berita baik bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang juga memiliki kepentingan ekspor. Negara-negara berkembang berusaha untuk mengembangkan ekspor lebih besar ke negara maju. Sayangnya, janji ini tidak pernah datang. Meskipun negara-negara maju mengurangi tarif mereka, negara-negara berkembang masih belum dapat akses ke pasar-pasar ini seperti yang diharapkan karena negara-negara maju klausul sanitary and phytosanitary measures untuk memblokir produk pertanian dari negara berkembang.

*Sanitary and phytosanitary (SPS)* merupakan regulasi negara tentang masuknya produk impor. Klausul SPS ini membatasi produk dari negara berkembang dengan syarat ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk impor yang masuk ke negara maju haruslah tidak ada penyakit, atau bahan kimia berbahaya lainnya yang dapat membahayakan konsumen dan industri domestik mereka.

### **5. Apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini ?**

Pendukung dari GATT-WTO akan menyatakan bahwa dampak dari liberalisasi sulit menyimpulkan pada saat ini. Menurut mereka, peningkatan impor dan perlambatan pertumbuhan dari industri dipersalahkan bukan liberalisasi pasar itu sendiri.

Dalam kasus Filipina, para ekonom menyatakan bahwa ketidakmampuan para petani untuk bersaing, adalah alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang cukup ini. Sementara itu, masyarakat sipil dan kelompok petani sepakat dengan pemerintah dalam memberikan prioritas kepada meningkatkan daya saing di sektor pertanian. Bahkan hal tersebut menjadi aspirasi masyarakat sipil, bahkan sejak sebelum ratifikasi GATT. Mereka mengatakan bahwa tanpa bantuan ini, pemerintah tidak memiliki hak untuk liberalisasi pasar dan menghapus perangkat perlindungan bagi penghidupan masyarakat. Sudah jelas bahwa di tahun-tahun yang berlalu sejak bergabung GATT-WTO, semua keuntungan yang dijanjikan pendukung WTO belum terwujud.

### **Neraca Perdagangan Pertanian Dari Positif menuju Negatif**

Neraca perdagangan adalah selisih antara ekspor dan impor. Sebuah negara dikatakan sebagai negara yang memiliki neraca positif jika ekspor yang lebih besar dari impor. Sementara itu negara memiliki neraca perdagangan negatif atau defisit jika impor lebih besar dibanding ekspor. Pada tahun 1993, sebelum Filipina meratifikasi WTO / GATT, Filipina memiliki neraca perdagangan positif sebesar \$ 300 juta. Setelah sepuluh tahun, pada tahun 2003, negara telah mencapai neraca perdagangan negatif atau defisit sekitar US \$ 900 juta. Negara tidak mendapatkan banyak manfaat dari pembukaan pasar untuk produk pertanian seperti yang dijanjikan WTO.

**6. Pada tahap ini, apa yang dapat dilakukan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan bahwa negotiators tidak kompromi untuk sektor pertanian di masing-masing negara?**

Pemantauan komitmen pemerintah menjadi sangat penting. Semua upaya untuk berkampanye dalam meningkatkan produktivitas pertanian, lebih meningkatkan ketahanan pangan akan tidak berguna jika kebijakan perdagangan yang tidak akan sesuai dengan tujuan.

**7. Apakah ada ketentuan dalam WTO yang memiliki potensi memberikan peluang perlindungan dari liberalisasi ?**

Saat ini, proposal dari G33 di SP dan SSM sedang dirundingkan di WTO. SP dan SSM adalah hasil dari lobi negara-negara berkembang untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam kesepakatan WTO, dan memiliki makna penting bagi implementasi klausul perlakuan khusus dan berbeda.

Komponen utama dari proposal ini adalah pengecualian dari kelompok produk, terutama produk pangan dari komitmen dalam klausul akses pasar dan dukungan domestik. Hal ini karena produk pangan tersebut penting bagi tujuan ketahanan pangan negara berkembang.

**Produk Khusus (SPs)** adalah produk pertanian yang merupakan kunci bagi ketahanan pangan, kelangsungan kehidupan dan pembangunan pedesaan, oleh karenanya maka perlu perlindungan perdagangan. **Mekanisme Pengamanan Khusus (SSM)** adalah mekanisme untuk mengatasi dampak impor. Provisi ini hanya bisa diakses oleh negara berkembang dan merupakan perbaikan dari *Special Safeguards (SSG)*.

Dengan penurunan tingkat tarif yang diusulkan sekarang sedang dalam WTO, maka sangat penting arti SPs dan SSM bagi negara berkembang. Oleh karena itu sangat penting bagi negara berkembang dan kelompok masyarakat sipil untuk memperjuangkan fleksibilitas maksimal dari SPs dan SSM.

Pemerintah negara-negara berkembang harus melakukan studi dan melihat keuntungan dari SPs dan SSM dalam perspektif kepentingan negaranya. Mereka harus mengidentifikasi produk yang paling penting untuk dilindungi dan tingkat perlindungan yang mereka butuhkan. Informasi ini akan membantu mereka menentukan SPs dan perlakuan yang tepat untuk produk khusus tersebut.

**8. Apa saja hal-hal spesifik yang perlu dicermati dalam perundingan WTO terkait dalam negosiasi SP / SSM?**

Di bawah ini adalah posisi awal G33 serta beberapa posisi yang diadopsi oleh R1 dan G33 CSO untuk SP dan SSM :

**Untuk Special Products (SPs)**

**Pemilihan Produk sebagai SPs** - Negara harus bebas untuk memilih produk yang akan diusulkan sebagai SPs. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa negara-negara berbeda-beda dalam tujuan pembangunan dan prioritas produk strategisnya, dan karena

itu harus ada fleksibilitas untuk mengidentifikasi cakupan produk yang akan diusulkan sebagai SP. Mengenai hal tersebut telah disepakati dalam pertemuan tingkat menteri (KTM) di Hongkong namun tekanan untuk kemunduran posisi ini masih sangat mungkin sehingga menjadi penting untuk terus melakukan lobi dan negosiasi.

**Cakupan atau Jumlah Produk yang akan dinyatakan sebagai SPs** - posisi awal dari G-33 adalah mencakup maksimum 20 persen dari total *tarif lines* (jumlah) produk pertanian sebagai SPs.

**Perlakuan untuk SPs** - G33 mengusulkan SPs harus dibebaskan dari pengurangan tarif dan MAV atau komitmen TRQ. Lebih dari hal tersebut R1 bersama G-33 CSO mengusulkan bahwa produk dalam kategori SPs harus mendapat proteksi yang besar, dengan menerapkan tarif diatas bound rates dan diperbolehkan untuk penerapan pembatasan kuantitatif dan diterapkan treatment khusus. Selain itu, SPs harus diperbolehkan untuk mendapatkan dukungan domestik yang memadai.

### **Untuk Special Safeguard Mechanism (SSM)**

**Penerapan SSM** - harus bisa diterapkan pada semua produk pertanian dari negara berkembang dan tidak hanya untuk SPs saja. Harus sederhana dalam persyaratannya dan mudah penerapannya.

**Trigger SSM** -G33 mengusulkan penggunaan volume dan harga sebagai trigger sebagai cara untuk mendefinisikan situasi dampak impor berlebih atau kejatuhan harga.

**Remedies untuk SSM** – Posisi G-33 adalah menekankan additional duties yang membolehkan harga impor disetarakan dengan triggernya. Posisi G33 CSOs adalah negara berkembang memiliki keleluasaan untuk menerapkan tarif lebih tinggi dari bound rate.

### **9. Sudah lama sejak Cancun ketika pertama kali G33 mengusulkan SP / SSM, apakah ada perubahan modalita dalam SP dan SSM ?**

Dari awal usulan G-33, maka perkembangan proposal SP dan SSM adalah makin detail. Negara berkembang telah memaparkan posisi yang kuat untuk menentang proposal negara maju yang cenderung melemahkan proposal awal G-33.

Inti dari masalah terkait dengan SPs adalah :

- Jumlah produk yang akan terkena pemotongan nol – Tawaran pertama muncul dari G-7 yang mengusulkan angka 5 persen dari total lini tarif produk pertanian. Posisi awal G-33 adalah 20 persen dari lini tarif harus dikecualikan dari pemotongan tarif. Dalam perkembangannya posisi ini terus melemah menjadi 10 persen dan kemudian 8 persen.
- Jumlah produk yang dinyatakan sebagai SPs- G7 mengusulkan 12 persen, namun G-33 membantah dengan menyatakan bahwa jumlah tersebut terlalu kecil sehingga perlu dinaikan menjadi 15 persen
- Jumlah tingkatan untuk pemotongan tarif pada SPs – G7 setuju untuk satu tingkat tarif saja dengan rata rata pemotongan 7 persen. G-33 menolak dan mengusulkan 9 persen karena hanya satu tingkatan untuk pemotongan tarif.

Terakhir G-33 setuju untuk dua tingkatan, satu produk dengan pemotongan tarif nol dan yang lainnya dengan pemotongan minimal.

• **SSM ( Special Safeguard Mechanism )**

Inti masalah sehubungan dengan SSM adalah:

- **Remedies** - yang utama adalah apakah atau tidak, remedies harus menghasilkan solusi untuk tingkat tarif yang akan pergi jauh dari bound rate Uruguay Round. G33 secara tegas berargumentasi bahwa remedies harus jauh dari sebelum Doha tarif bindings. Argentina, Paraguay, Uruguay (APU), Kanada, Amerika Serikat dan Thailand menolak proposal ini. Dalam negosiasi sepakat bahwa remedies diterapkan melampaui bound rate, namun dalam proses para penentang G-33 berusaha untuk membatasi akses dari remedies dengan usulan level trigger yang lebih besar sampai 140 persen. Ini berarti bahwa impor harus meningkat sampai 40 persen di atas level trigger sebelum remedies bisa diterapkan. Bahkan USA mengusulkan untuk meningkatkan level trigger sampai 150 persen
- **Cross check** – Proposal G7 menyatakan harga harus menurun agar remedies dapat dilakukan, walaupun volume impor sudah sangat besar. Hal ini jelas upaya untuk membatasi akses dan penggunaan SSM, karena untuk bisa menerapkan SSM, karena negara harus memenuhi dua persyaratan
- **Penggunaan SSM harus berdasar prinsip MFN** - Ini menunjukkan bahwa impor dalam kerangka preferential treatment tidak dianggap sebagai bentuk banjir impor. Akan tetapi isu ini tidak banyak dibahas dalam negosiasi, karena konsentrasi perundingan lebih banyak pada remedies dan trigger dari penerapan SSM.

**10. Jika terjadi pelemahan posisi, apakah kita masih bisa melakukan sesuatu?**

Kenyataan bahwa meskipun sepanjang perjalanan negosiasi dan tidak ada kesepakatan tercapai adalah tanda bahwa suara dari organisasi masyarakat sipil mulai bergema dan mulai berpengaruh dalam proses negosiasi, walaupun hasilnya masih sangat memprihatinkan. Negara-negara maju terus menuntut banyak untuk melemahkan klausul penting ini terutama SSM, Bahkan, beberapa negara-negara berkembang dengan kepentingan ekspor juga melakukan tekanan yang sama seperti halnya negara maju, seperti Thailand, Malaysia, Uruguay, Paraguay, Argentina, dll.)

Meningkatnya jumlah penentang negara penentang SP dan SSM, membuat publik semakin mendukung provisi perlindungan ini. Tanpa dukungan organisasi masyarakat sipil untuk terus mendorong fleksibilitas maksimum dari SP dan SSM, tidak mengejutkan jika G-33 akan menyerah pada permintaan dari negara maju.

Hal ini membuat sangat penting peran organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara untuk menuntut masing-masing negara agar mengakui SP dan SSM. Pada saat yang sama negara berkembang yang tergabung dalam G33 harus terus menegosiasikan semaksimal mungkin provisi SP dan SSM agar menjadi benteng pertahanan terakhir dari upaya perlindungan dampak liberalisasi sektor pertanian.

## **ANNEX – Pertemuan Penting, Resolusi dan Blok Blok dalam perundingan di WTO.**

Pertemuan tingkat menteri (KTM) WTO dilakukan setiap dua tahun sekali untuk mendiskusikan implementasi dari kesepakatan. WTO telah melakukan beberapa pertemuan Menteri - Singapura (1996), Geneva (1998), Seattle (1999), Doha (2001), Cancun (2002), Hongkong (2005).

### **KTM Seattle**

Krisis pertama kali dalam KTM WTO. Untuk pertama kalinya, negara-negara berkembang menyatakan kegelisahan mereka atas dampak dari liberalisasi ekonomi mereka. Hal ini karena ketidakadilan dari ketentuan WTO-AoA dan pelaksanaannya. Bersamaan dengan perundingan Menteri di Seattle, terjadi demonstrasi anti-liberalisasi perdagangan di luar perundingan. Para demonstran termasuk petani, buruh dan LSM dari seluruh dunia. Protes ini menjadi sangat besar ketika polisi Amerika Serikat berusaha untuk membubarkan demonstrasi. Karena terjadi krisis di dalam dan di luar perundingan maka KTM gagal dalam menghasilkan kesepakatan dan mengumumkan putaran perundingan yang baru.

### **Doha Development Round**

Setelah Seattle, WTO memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan di Doha, Qatar. Menurut penyelenggara, protes yang lebih sulit dilakukan karena memang disiapkan dengan pengendalian pemerintah Qatar yang kuat.

Dalam pertemuan ini, WTO berhasil meluncurkan **Doha Development Round**. Dengan meningkatnya protes pada liberalisasi perdagangan dan tekanan publik yang kuat membuat isu pembangunan menjadi jantung bagi proses negosiasi. Hal ini berarti perundingan mulai mengarah pada tujuan untuk mengatasi kesenjangan dari ketentuan dan bagaimana implementasinya.

Doha Development Agenda ini diluncurkan pada perundingan di Doha. Meskipun pembangunan yang telah menjadi bagian dari agenda, tapi liberalisasi masih menjadi muatan yang sangat kuat dalam perundingan.

### **Kegagalan KTM Cancun**

KTM di Cancun diharapkan menjadi ajang untuk mendiskusikan DDA secara lebih ekstensif. Namun hal ini tidak terjadi karena negara maju mempertahankan kepentingan mereka dan tidak memenuhi komitmen untuk mengakomodasi aspirasi negara berkembang. Negara maju tidak mau subsidi mereka di hapuskan, padahal pengurangan subsidi domestik adalah salah satu tujuan terpenting dalam perdagangan bebas. Selain itu negara maju ingin memasukan Singapore issues dalam perundingan. Singapore issues mencakup : kebijakan persaingan, masalah pengadaan pemerintah, fasilitasi perdagangan dan lain-lain yang pertama diangkat ketika KTM di Singapore tahun 1996. Negara-negara berkembang menentang upaya ini. Menurut mereka hal ini hanya akan menguntungkan negara maju karena instrumen tersebut jelas merupakan kepentingan mereka. Tidak adanya konsensus di Cancun maka perundingan kembali mengalami kegagalan.

## **Kekuatan kekuatan besar dan kepentingan dalam perundingan**

Dalam perundingan blok blok kekuatan berusaha untuk mendorong kepentingan mereka dalam negosiasi. Dalam sejarah WTO, berikut ini konfigurasi blok blok kekuatan utama dalam perundingan :

### **Amerika Serikat**

- agresif dalam pembukaan pasar
- akan mempertahankan, sebisa mungkin tingkat subsidi domestik yang tinggi

### **Uni Eropa**

- Sangat protektif terhadap pasar domestik mereka dan beberapa produk tertentu
- akan mempertahankan, sebisa mungkin tingkat subsidi domestik yang tinggi

### **G20**

- Penghapusan subsidi ekspor
- menginginkan reduksi substansial subsidi domestik di negara-negara maju
- terdiri dari Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kuba, Mesir, Guatemala, India, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Filipina, Afrika Selatan, Thailand, Venezuela, Zimbabwe

### **G33**

- mengajukan perangkat perlindungan untuk produk pertanian utama yang penting bagi ketahanan pangan, kelangsungan penghidupan dan pembangunan pedesaan melalui SP dan SSM
- Mengembangkan sebagian besar negara-negara berkembang dengan status net-importer
- terdiri dari Barbados, Botswana, Cina, Kuba, Kongo, Cote d'Ivoire, Republik Dominika, Haiti, Honduras, Indonesia, Jamaika, Kenya, Korea, Mauritius, Mongolia, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Filipina, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Turki, Uganda, Venezuela, dan Zambia Zimbabwe

### **G10**

- Proteksi terhadap beberapa produk yang sensitif
- terdiri dari Bulgaria, Islandia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Liechtenstein, Mauritius, Norwegia, Swiss, China Taipei

## **Juli Framework Agreement**

Setelah gagalnya KTM Cancun, WTO menghasilkan dokumen yang memandu kerangka perundingan lanjutan. Kerangka tersebut disebut July Framework Agreement dimana terkandung didalamnya prinsip dasar yang memandu perundingan lanjutan.

## **Isi July Framework Agreement**

Seperti AOA, cakupan juga berfokus pada 3 pilar utama:

### **Akses pasar**

Akses pasar di bawah ketentuan Juli Framework, dinyatakan untuk terus melanjutkan liberalisasi perdagangan. Namun dalam July Framework, kategori produk menjadi tiga.

### **Semua produk pertanian**

Ini adalah produk yang biasa akan terkena pengurangan tarif normal sesuai dengan komitmen liberalisasi. Paper tidak memasukkan diskusi tentang pemotongan tarif aktual untuk produk tersebut. Namun jelas di sini bahwa semua negara-negara diharapkan untuk mengurangi tarif untuk produk yang akan jatuh di bawah kategori ini

### **Produk Sensitif**

Berikut ini kategori produk terdiri dari produk pertanian yang dianggap produk sensitif. Provisi produk sensitif ini telah termasuk dalam prinsip perbaikan substansial dimana selain mengurangi level tarif dari produk juga mengembangkan *Minimum Access Volume (MAV)*. MAV mengacu pada prinsip perbaikan substansial dimana pemerintah bisa menggunakan kombinasi dari reduksi tarif dan ekspansi TRQ dan *in-quota tariff*. Baik negara berkembang maupun negara maju bisa mengakses provisi sensitive products ini.

### **Special Products**

Kategori produk ketiga adalah Produk Khusus atau SPs. bersama dengan klausul SSM, merupakan proposal dari G33. SPs adalah produk yang dianggap penting bagi negara-negara berkembang untuk ketahanan pangan, kelangsungan penghidupan dan pedesaan dan pengembangan. Teks dalam July Framework, tidak terlalu jelas dalam mengatur ketentuan SPs, dan detailnya akan dirundingkan dalam perundingan.

G33 mengadvokasikan agar SPs diperlakukan secara terpisah dari keseluruhan kesepakatan akses pasar. Menurut mereka, SPs dan SSM adalah implementasi operasional dari Special and Differential Treatment.

### **Kompetisi Ekspor**

Sebagai konsesi dari kepentingan negara berkembang maka July Framework menyebutkan batas akhir dari penerapan subsidi ekspor, namun tidak secara spesifik menyebutkan waktunya. July Framework menekankan pendisiplinan subsidi ekspor dengan jangka waktu tidak boleh lebih dari 180 hari. Namun semua materi detail akan dirundingkan dalam proses negosiasi. July Framework tidak menyebutkan ketentuan apapun mengenai bantuan pangan, walaupun dinyatakan perlunya mengatur masalah ini.

### **Subsidi Domestik**

#### **Pengurangan Total Distorting Dukungan Perdagangan (OTDS)**

Negara-negara kaya diharapkan untuk menerapkan reduksi subsidi domestik lebih tinggi. OTDS yang merupakan hasil dari kombinasi dari de minimis, subsidi dalam Blue Box dan Amber Box atau dikenal sebagai *Aggregate Measure Support (AMS)*. Menurut July Framework, tingkat subsidi suatu negara tidak boleh melebihi 80 persen dari OTDS

pada tahun pertama dan akhir dari implementasi. Penting untuk dicatat bahwa penentuan OTDS didasarkan pada bound rates (atau tingkat subsidi tertinggi) dimana negara bisa berikan kepada petani mereka. Situasi umum adalah bahwa tingkat bound level selalu lebih tinggi dari praktek pemberian subsidi dalam implementasinya. Oleh karena itu maka OTDS yang diijinkan masih sangat tinggi dari subsidi aktual yang diberikan negara maju. Jadi, negara-negara maju memberikan cukup ruang penerapan kebijakan subsidi di masa mendatang.

AS memberi US \$ 24,6 juta, sedangkan yang diberikan Uni Eropa US \$ 73,2 juta pada subsidi 2000. Menggunakan rumus pada July Framework, Amerika Serikat dan Uni Eropa tetap dapat meningkatkan dukungan domestik mereka, masing-masing menjadi US \$ 38,1 juta dan US \$ 91,1 juta. Dalam hal ini, sangat jelas bahwa tidak akan ada pengurangan dukungan domestik secara aktual dan tidak ada upaya nyata untuk membuat perdagangan lebih adil.

### **Pergeseran antar Box melalui ekspansi Blue Box**

Pengurangan subsidi yang dilarang dalam WTO, yaitu yang termasuk dalam Amber Box membuat negara maju seperti Amerika Serikat mencari cara lain untuk memberikan subsidi bagi petani mereka. Ini adalah alasan mengapa negara-negara maju mendorong perluasan Blue Box sehingga negara maju bisa memindahkan subsidi dari Amber ke Blue Box. Kerangka perjanjian juga menetapkan bahwa negara dapat memberikan tambahan subsidi dari 5 persen dari mereka atas segala total nilai produksi. Hal ini pada dasarnya, hanya negara-negara kaya yang mampu memberi subsidi semacam itu dengan minimis sebesar 5 persen dari total nilai produksi pertanian. Oleh karena provisi baru ini maka negara maju tidak perlu memotong subsidi mereka

### **KTM Hong Kong**

Pada Desember 2005, KTM WTO ke enam dilakukan di Hong Kong dengan maksud untuk menyelesaikan Doha Development Agenda. Ini ditujukan untuk merubah modalitas dari DDA menjadi aturan lebih jelas dan rinci. Secara khusus, KTM ini adalah untuk mendefinisikan substansi yang tertuang dalam July Framework. Berikut adalah elemen-elemen penting Deklarasi Hong Kong:

- Menyepakati empat tingkat penurunan tarif untuk negara berkembang dan negara maju, dimana secara detail akan dibahas di Geneva.
- 2013 adalah batas akhir untuk aplikasi subsidi ekspor, negara-negara berkembang sangat kuat mendorong agar batas waktu dipercepat menjadi 2010
- Tidak jelas memberikan disiplin ketat pada subsidi domestik terutama blue box. Negara berkembang bisa menentukan sendiri SPs tapi tidak ada indikasi jumlah lini tarif yang bisa dicakup sebagai SPs
- Tidak ada ketentuan yang jelas tentang SSM kecuali akan bisa diterapkan dengan trigger harga dan volume.
- Dengan mandat dari Hongkong, pemantauan maka proses sangat penting adalah perundingan di Geneva dan penentu kesuksesan perundingan.

### **Informal Menteri Rapat-Jenewa, Swiss Juli 2008**

Pertemuan Menteri secara resmi kandas pada 29 Juli 2008. Kegagalan terutama karena tidak ada kata sepakat dalam SSM, terutama penentuan trigger dan tingkat bound rate untuk penerapan SSM. Amerika Serikat yang memicu dengan usulan dari 150 persen, bahkan lebih tinggi dari usulan mereka sebelumnya 140 persen yang telah ditolak G33.

Sementara itu, Amerika Serikat menawarkan untuk memotong OTDS sebesar US \$ 15 miliar. OTDS Amerika dalam tiga tahun terakhir telah lebih rendah dari jumlah ini, yang berarti bahwa pemotongan US \$ 15 miliar subsidi dalam kenyataan tidak efektif karena tidak memotong subsidi aktual mereka. G-20 menerima hal ini namun mendesak AS untuk melakukan pemotongan yang lebih besar. Anggota WTO tidak menyadari bahwa US \$ 15 miliar adalah sebagai angka akhir seperti yang dijelaskan oleh China dalam dialog dengan organisasi masyarakat sipil. Negara-negara lain beranggapan bahwa US dapat mampu lagi mengurangi subsidi jika jika kurang dari US \$ 15 miliar, dan hal ini kembali memberikan dampak bagi keleluasaan Amerika Serikat dalam meningkatkan subsidi domestik.

**REFERENSI:**

- PGTEP Notes
- Kasunduan sa Agrikultura ng World Trade Organization
- Seizing Opportunities : SP/SSM